



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 41 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**POLA KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kearsipan yakni tata naskah dinas, klasifikasi arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrument dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 82);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atas peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa katagori unit informasi kearsipan.
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah symbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
10. Series adalah himpunan arsip yang tercipta, yang diatur dan dikelola sebagai suatu etetitas informasi karena adanya keterkaitan secara fungsional, kegiatan dan kesamaan subjek.
11. Berkas adalah himpunan arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam suatu konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki kesamaan jenis dan kesamaam masalah.
12. Isi Berkas adalah arsip yang merupakan informasi terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi secara intelektual, yang mencerminkan penyelesaian setiap butir transaksi.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk pengelolaan arsip bagi unit kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk penggabungan huruf dan angka;

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini ialah sebagai pedoman pengelompokan arsip secara logis dan sistimatis yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya;
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
  - a. Kode Klasifikasi;
  - b. Pembinaan dan Pembiayaan.

### **BAB III KODE KLASIFIKASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah, pencipta arsip menggunakan kode klasifikasi dengan berdasarkan angka/ numerik dan sebagai pedoman penomoran surat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Kearsipan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kearsipan di Daerah.

#### **Pasal 5**

Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kearsipan di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 43) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 11 Oktober 2021

**BUPATI SERUYAN,**  
ttd  
**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 8 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
ttd  
**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 41**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SERUYAN  
 NOMOR 41 TAHUN 2021  
 TANGGAL 11 OKTOBER 2021  
 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP  
 PEMERINTAH DAERAH

POLA KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH	
(Permendagri Nomor : 78 Tahun 2012)	
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	
001.4	Daerah
001.41	Daerah Tingkat I
001.42	Daerah Tingkat II
002	Tanda kehormatan/Penghargaan untuk Pegawai lihat 861.1
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Samkarya Nugraha
002.4	Monumen
002.5	Penghargaan Secara adat
002.6	Penghargaan lain
003	Hari Raya/Besar
003.1	Nasional 17 Agustus,Hari pahlawan dsb
003.2	Keagaman Idul Fitri
003.3	Hari Ulang Tahun (HUT)
003.4	Hari jadi
004	Ucapan Terima Kasih/Selamat,Belasungkawa
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Pejabat lain
007	-
008	-
009	-
010	URUSAN DALAM
011	Gedung Kantor Termasuk Instalansi,Prasarana fisik pamong Praja
012	Rumah Dinas
012.1	Tanah untuk Rumah Dinas
012.2	Perabotan
013	Mess/Guest House/Asrama

014	Rumah Susun/ Apartemen
015	Penerangan Listrik
016	Telepon
017	Keamanan/Keteriban Kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol
019.1	Upacara Bendera
019.2	Gelar senja
019.3	Tata tempat
019.31	Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden
019.4	Audiensi
019.5	Alamat-alamat kantor dan pejabat
020	PERALATAN
020.1	Penawaran
021	Alat tulis
022	Mesin kantor
023	Perabot kantor
024	Alat angkutan /Kendaraan dinas
025	Pakaian Dinas/ID Card/Kartu Identitas
026	Senjata
027	Pengadaan termasuk RKBU,Standar Harga
028	Inventaris
029	-
030	KEKAYAAN DAERAH
031	Sumber Daya Alam
032	Aset Daerah
033	-
034	-
035	-
036	-
037	-
038	-
039	-
040	PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
041	Perpustakaan
	(1.Umum, 2.Khusus, 3. Perguruan Tinggi, 4. Sekolah, 5.keliling,dinas/instansi/kecamatan/desa dan sebagainya
042	Dokumentasi
043	-
044	-
045	Kearsipan
045.1	Pola Klasifikasi
045.2	Penataan Berkas
045.3	Penyusutan Arsip
045.31	Jadwal Retensi Arsip



045.32	Pemindahan Arsip
045.33	Penilaian Arsip
045.34	Pemusnahan Arsip
045.35	Penyerahan Arsip
045.36	Berita Acara Penyusutan Arsip
045.37	Daftar Pencarian Arsip
045.4	Pembinaan Kearsipan
045.41	Bimbingan Teknis
045.5	Pemeliharaan/Perawatan Arsip
045.6	Pengawetan/fumigasi
046	Sandi (Sarana sandi/pemeliharaan)
047	Website
048	Pengelolaan Data
049	Jaringan Komunikasi Data
050	PERENCANAAN
	Meliputi rencana pemabangunaan lima tahun, dan perencanaan umum
050.1	REPELITA
	11. Pelita Daerah. Tambahkan kode wilayah
050.12	Bantuan Pembangunan Daerah. Tambahkan kode wilayah
050.13	Bappeda
050.2	Perencanaan/proyek bidang peralatan
050.41	Bidang Perpustakaan
050.45	Bidang Kearsipan
050.46	Bidang Sandi
050.6	Organisasi/ketatalaksanaan
050.7	Penelitian.
051	Bidang pemerintahan
	Klasifikasi disini: Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan
	Tambahkan perincian 100 pada 051
	Contoh proyek kepenjaraan: 051.86
052	Bidang Politik
053	Bidang keamanan ketertiban
	Tambahkan perincian 300 pada 053
	Contoh: proyek Kepagar- prajaan: 053.311
054	Bidang Kesejahteraan Rakyat
	Tambahkan perincian 400 pada 054
	Contoh: proyek Resettlement Desa : 054.671
055	Bidang Perekonomian
	Tambahkan perincian 500 pada 055
	Contoh : Proyek pasar: 055.112
056	Bidang pekerjaan umum
	Tambahkan perincian 600 pada 056
	Contoh: Proyek jembatan: 056.3
057	Bidang Pengawasan
058	Bidang Kepegawaian
059	Bidang Keuangan
060	ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN
061	Organisasi intansi pemerintah
061.1	Susunan dan tata kerja
061.2	Tata tertib kantor.jam kerja

061.3	Struktur organisasi
061.4	Tugas pokok dan fungsi
061.5	Gerakan disiplin Nasional
061.6	Supporting organisasi
061.7	Program kerja
061.8	Standar pola minimal
061.9	Pelayanan umum/UPTSA
061.10	LAKIP dsb
062	Organisasi badan Non pemerintah
063	Organisasi badan internasional
064	Organisasi semni pemerintah. BKS-AKSI
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata naskah dinas
065.2	Stempel
065.3	Alamat kantor
065.4	Papan nama instansi dsb
066	Stempel Dinas
067	Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/ Analisis
068	Komputerisasi/ Siskomdagri
069	Standar Pelayanan Minimal
070	PENELITIAN
071	Riset
072	Survey
073	Kajian
074	Kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi
075	Kementerian Lainnya
076	Non Kementerian
077	Provinsi
078	Kabupaten/Kota
079	Kecamatan/ Desa
080	KONPERENSI
081	Gubernur
082	Bupati/ wali kota
083	Komponen, eselon lainnya
084	Intansi lainnya
085	Internasional di dalam negri
086	Internasional di luar negri
087	-
088	-
089	-
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan presiden/ Wakil Presiden ke daerah
092	Perjalanan Mentri ke daerah
093	Perjalanan Pejabat tinggi ( Pejabat Eselon 1)
094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemangilan pegawai,kunjungan kerja
095	Perjalanan Tamu asing ke daerah
096	Perjalanan Presiden/ Wakil presiden ke luar negri
097	Perjalanan Mentri ke luar negri
098	Perjalanan Pejabat tinggi ke luar negri
099	Perjalanan Pegawai ke luar negri

100	PEMERINTAH
	Meliputi tatapraja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan Luar Negri.
100	PEMERINTAHAN
101	-
102	GDN
103	-
104	-
105	-
106	-
107	-
108	-
109	-
110	PEMERINTAH PUSAT
111	Presiden
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah trima jabatan.
111.1	Pertanggung jawaban MPR
111.2	Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/ Pidato kenegaraan
112	Wakil Presiden
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah trima jabatan
112.1	Pertanggung jawaban wakil Presiden kepada MPR
112.2	Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato
113	Susunan cabinet
113. 1	Reshufle
113.2	Penunjukan materi ad interim
113.3	Sidang kabinet. Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi lihat 500.1
114.	Kementerian Dalam Negri
114.1	Amanat menteri Dalam Negri/ Sambutan
114.2	Sekretariat Jendral
114.3	Direktorat Jendral
115	Kementerian lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117	Lembaga Non Kementerian
118	Otonomi/ Desentralisasi/Dekonsentrasi
119	Kerjasama antara Kementerian
120	PEMERINTAH PROVINSI
120.04	Laporan daerah, Tambahkan kode wilayah
042	Menografi. Tambahkan kode wilayah
042.1	Koordinasi
042.2	Intansi tingkat Provinsi
042.21	Dinas Otonom
042.22	Instansi Vertikal
042.23	Kerjasama Antar Provinsi
121	Kepala Daerah/ Gubernur .Tambahkan Kode Wilayah.
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serta terima jabatan dsb.
122	Wakil kepala Daerah/ Wakil Gubernur.Tambahkan kode wilayah.
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serta terima jabatan dsb.
123	Sekretaris Wilayah Daerah/ Sekertaris Daerah. Tambahkan kode wilayah.

	Meliputi, pencalonan, serah terima jabatan
124	Badan-badan pertimbangan daerah
	Meliputi Muspida, Forum panitia anggaran nasional, Forum koordinasi lainnya
125	Pembentukan/pemekaran wilayah
	Pembentukan daerah Otonom, Perubahan batas wilayah ,Pemekaran
125.2	Pembentukan Wilayah
125.3	Pemindahan Ibu Kota
125.4	Perubahan Batas Wilayah
125.5	Pemekaran Wilayah
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan urusan
128	Swapraja
129	-
130	PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT III
130.04	Laporan daerah tingkat II
130.1	Koordinasi
130.2	Instansi tingkat kabupaten/ kotamadya
	Laporan daerah meliputi, Laporan kegiatan
130.21	Dinas Otonom
130.22	Instansi Vertikal
131	Kepala Daerah/ Bupati. Tambahkan kode wilayah
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serta terima jabatan ,berita acara serah terima jabatan dan memori Kepala
131.1	Sambutan/pengarahan/Amanat Bupati
132	Wakil kepala Daerah/ Wakil Bupati.Tambahkan kode wilayah.
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serta terima jabatan dsb.
133	Sekretaris wakil/daerah. Tambahkan kode wilayah.
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serta terima jabatan dsb.
134	Forum koordinasi Pemerintah di daerah
134.1	Muspida
134.2	Forum PAN
134.3	Forum koordinasi lainnya
134.4	Kerjasama Antar Kabupaten
135	Pembentukan / Pemekaran Wilayah
135.1	Pemindahan Ibukota
135.2	Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/ Walikota
135.3	Pembagian Wilayah Kabupaten /Kota
135.4	Perubahan Batas Wilayah
135.5	Pemekaran Wilayah
135.6	Permasalahan Batas Wilayah
135.7	Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota/ pemberian dan Penggantian
	Nama Kabupaten/Kota, Daerah
135.8	Jalan
136	Pembagian Wilayah
137	Penyerahan urusan
138	Pemerintah Wilayah Kecamatan
138.1	Sambutan/Pengarahan/Amanat

138.2	Pembentukan Kecamatan
138.3	Pemekaran Kecamatan
138.4	Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
138.5	Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren
138.6	-
138.7	-
139	-
140	PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
	Pamong Desa, Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Meninggal
141	Pengangkatan, Pemberhentian, dan Sebagainya
142	Penghasilan Pamong Desa
143	Kekayaan Desa
144	Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
145	Adminitrasi Desa
146	Kewilayahan
146.1	Pembentukan Desa/Kelurahan
146.2	Pemekaran Desa/Kelurahan
146.3	Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
146.4	Perubahan Nama Desa/Kelurahan
146.5	Kerjasama Antar Desa
147	Lembaga – Lembaga Tingkat Desa
	Jangan Klasifikasikan disini, Lihat 410 Dengan Perinciannya
148	Perangkat Kelurahan
148.1	Kepala Kelurahan
148.2	Sekretaris Kelurahan
148.3	Staf Kelurahan
149	Dewan Kelurahan
149.1	Rukun Tetangga
149.2	Rukun Warga
149.3	Rukun Kampung
150	LEGISLATIF MPR/DPR/DPD
151	Keanggotaan MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pemberhentian
151.3	Recall
151.4	Pelanggaran
152	Persidangan
153	Kesejahteraan
153.1	Keuangan
153.2	Penghargaan
154	Hak
155	Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan
	Persidangan Sidang Pleno Dengar Pendapat/rapat Komisi
156	Reses
157	Kesejahteraan
157.1	Keuangan
157.2	Penghargaan
158	Jawaban Pemerintah
159	Hak
160	DPRD PROVINSI TAMBAHAN KODE WILAYAH

161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan
161.3	Pemberhentian
161.4	Recall
161.5	Meninggal
162	Persidangan
162.1	Reses
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
165	Sekretaris DPRD Provinsi
166	-
167	-
168	-
169	-
170	DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH
171	KEANGGOTAAN
171.1	Pecalonan
171.2	Pengangkatan
171.3	Pemberhentian
171.4	Recall
171.5	Pelanggaran
172	Persidangan
173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan
174	Hak
175	Sekretaria DPRD Kabupaten/ Kota
176	-
177	-
178	-
179	-
180	HUKUM
180.1	Konstitusi
180.11	Dasar Hukum
180.12	Undang-undang Dasar
180.2	GBHN
180.3	Amnesti, Abolisi dan Grasi
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang/piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
181.4	Notariat
182	Pidana
182.1	PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil )
183	Peradilan

	Peradilan Agama Islam lh. 451.6
	Peradilan perkara tanah lh 593.71
183.1	Bantuan Hukum
183.4	Peradilan Umum
183.5	Peradilan militer
183.6	Peradilan tata usaha negara
183.7	Upaya hukum
183.8	Ekskusi
183.9	Pembinaan hukum
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Paspor
185.3	Exit
185.4	Reentry
185.5	Lintas batas
186	Kepenjaraan
186.1	Lembaga pemasyarakatan
186.2	Rumah tahanan
187	Kejaksaan
188	Peraturasn Perundang-undangan
188.1	TAP MPR
188.2	Undang-undang
188.3	Peraturan
188.31	Peraturan Pemerintah
188.32	Peraturan Menteri
188.33	Peraturan Lembaga non Departemen
188.34	Peraturan Daerah
188.34.1	Peraturan Daerah Tingkat I
188.34.2	Peraturan Daerah Tingkat II
188.4	Keputusan
188.41	Presiden
188.42	Menteri
188.43	Lembaga Non Depertemen
188.44	Gubernur
188.45	Bupati/ wali kota
188.5	Instruksi
188.51	Presiden
188.52	Menteri
188.53	Lembaga Non Depertemen
188.54	Gubernur
188.55	Bupati/ wali kota
189	Hukum adat
189.1	Tokoh adat/masyarakat
190	HUBUNGAN LUAR NEGRI
191	Perwakilan asing
192	Tamu Negara
193.	Kerjasama dengan Negara Asing
193.1	Asean
193.2	Bantuan Luar negri

194	Perwakilan RI di luar Negri/Hibah
195	PBB
196	Laporan luar negri
197	Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
198	-
199	-
200	POLITIK
201	Kebijaksanaan Umum, Santiaji, Wawasan kebangsaan
202	Orde Baru
203	Reformasi
204	-
205	-
206	-
210	KEPARTAIAN
211	Lambang Kepartaian
212	Kartu tanda Anggota
213	Bantuan Keuangan Parpol
214	-
215	-
216	-
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Berdasarkan Perjuangan
221.1	Perintis Kemerdekaan
221.2	Angkatan 45
221.3	Veteran
222	Berdasarkan Kekaryaan
222.1	PEPABRI
222.2	Wreda Tama
223	Berdasarkan Kerohanian
223.1	Muhammadiyah
223.2	N.U
223.3	Persatuan Tarikat Islam
223.4	LDII
223.5	Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWJ)
224	Lembaga Adat
225	Lembaga Swadaya Masyarakat
226	-
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONIL
231	Ikatan Dokter Indonesia
232	Persatuan Guru Republik Indonesia
233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum
236	Korps Pegawai Republik Indonesia
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Organisasi Profesi dan fungsional lainnya
239	-
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa



243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
246	Gerakan Pemuda Marhaenis
247	-
248	-
250	ORGANISASI BURUH,TANI DAN NELAYAN DAN ANGGKUTAN
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
256	-
257	-
258	-
260	ORGANISASI WANITA
261	Drama Wanita
262	Kongres Wanita Indonesia
263	Persatuan Wanita Republik Indonesia
264	Kongres Wanita
265	-
266	-
267	-
268	-
269	-
270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Tanda gambar
273	Kampanye
274	Komisi pemilihan umum (Petugas Pemilu)
275	Pemilih/Daftar Pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
276.5	Dana
277	Pemungutan suara/ penghitungan suara
278	Hasil pemilu
279	Keuangan
280	Pengucapan Sumpah Janji MPR,DPR, DPD
281	-
282	-
283	-
284	-
300	KEAMANAN /KETERTIBAN
301	Keamanan
302	Ketertiban
303	-
310	PERTAHANAN

311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Perbatasan
315	-
316	-
317	-
320	KEMILITERAN
321	Latihan Militer dan Bela Negara
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer / Darurat militer
323.1	TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa)
324	Kekaryaannya TNI Pejabat Sipil dari TNI
324.1	TMD
325	-
326	-
327	-
328	-
329	-
330	KEAMANAN
331	Kepolisian
331.1	Polisi Pamong Praja
331.2	Satuan pengamanan (SATPAM/ Security)
331.3	Kamling
331.4	Jaga Wana
332	Huru-hara/Demonstrasi
333	Senjata api/tajam
334	Bahan Peledak/ BOM
335	Perjudian ,TOGEL
336	Surat-surat kaleng
337	Pengaduan
338	Himbauan/Larangan
339	Teroris
340	PERTAHANAN SIPIL
341	Perlindungan Sipil
342	-
343	-
344	-
350	KEJAHATAN
351	Makar/pemberontakan
352	Pembunuhan
352.1	Bunuh diri
352.2	Keracunan
353	Penganiayaan, pencurian,/pemasaran
354	Subversi/penyelundupan/narkotika
355	Pemalsuan
355.1	Uang
355.2	Ijazah
355.3	Kejahatan pemalsuan lainnya
356	Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan/KKN

357	Perkosaan/perbuatan cabul
358	Kenakalan
359	Kejahatan lainnya
360	BENCANA (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam /Satlak PBA)
361	Gunung berapi/gempa
362	Banjir/tanah longsor
363	Angin topan
364	Kebakaran
364.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Tsunami
367	-
368	-
369	-
370	KECELAKAAN/SAR
371	Darat
372	Udara
373	Laut
374	Sungai/ Danau
375	-
376	-
377	-
378	-
379	-
380	-
381	-
382	-
383	-
390	-
391	-
392	-
393	-
<b>400</b>	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT (SMD Berkualitas)</b>
401	Keluarga Miskin
402	PNPM Mandiri Pedesaan
403	-
410	PEMBANGUNAN DESA
411	Pembinaan Usaha Gotong Royong
411.1	Swadaya Gotong Royong
411.11	Penataan gotong royong
411.12	Gotong royong Dinamis
411.13	Gotong royong Statis
411.14	Pungutan
411.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)
411.21	Pembinaan
411.22	Klasifikasi
411.23	Proyek
411.24	Musyawaharah
411.3	Latihan Kerja Masyarakat

411.31	Kader Masyarakat
411.32	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
411.33	Pusat Latihan
411.34	Kursus-kursus
411.35	Kurikulum/Sylabus
411.36	Keterampilan
411.37	Pramuka
411.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
411.41	Progam
411.42	Pembinaan Organisasi
411.43	Kegiatan
411.44	Pengarusutamaan Gender (PUG)
411.45	Pemberdayaan Perempuan
411.5	Penyuluhan
411.51	Publikasi
411.52	Peragaan
411.53	Sosio Drama
411.54	Siaran Pedesaan
411.55	Penyuluhan lapangan
411.6	Kelembagaan Desa
411.61	Kelompok Tani
411.62	Rukun Tani
411.63	Subak
411.64	Dharma Tirta
411.65	Klompencapir
411.66	Kelompok Tani Ternak
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Keuangan Desa
412.21	Perkreditan Desa
412.22	Innsventarisasi Desa
412.23	Perkembangan/pelaksanaan
412.24	Bantuan/ Stimulans
412.25	Petunjuk/pembinaan Pelaksanaan
412.3	Koperasi Desa
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.32	Koperasi Usaha Desa (KUD)
412.33	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)
412.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
412.41	Jumlah Desa Yang diberi Bantuan
412.42	Pengarahan
412.43	Pusat
412.44	Daerah
412.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
412.51	Pusat
412.52	Daerah
412.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
412.61	Bantuan Langsung

412.62	Bantuan Keserasian
412.63	Bantuan Juara Lomba Desa
413	Prasarana Desa
413.1	Prasarana Desa
413.11	Pembinaan
413.12	Bimbingan Tehnis
413.2	Pemukiman Kembali Penduduk
413.21	Lokasi
413.22	Dikusi
413.23	Pelaksanaan
413.3	Masyarakat Pradesa
413.31	Pembinaan
413.32	Penyuluhan
413.33	Kimpraswil
413.4	Pemugaran Perumahan dan Lingkungn Desa
413.41	Rumah Sehat
413.42	Proyek Perintis
413.43	Pelaksanaan
413.44	Pengembangan
413.45	Perbaikan Kampung
414	Pengembangan Desa
414.1	Tingkat Perkembangan Desa
414.12	Jumlah Desa
414.13	Pemekaran Desa
414.14	Pembentukan Desa Baru
414.15	Evaluasi
414.16	Bagan
414.17	RT berprestasi
414.2	Unit Daerah Kerja Pembangunan(UDKP)
414.21	Penyusunan Program
414.22	Lokasi UDKP
414.23	Pelaksanaan
414.24	Bimbingan /Pembinaan
414.25	Evaluasi
414.3	Tata Desa
414.31	Inventarisasi
414.32	Penyusunan Pola Tata Desa
414.33	Aplikasi Tata Desa
414.34	Pemetaan
414.35	Pedoman Pelaksanaan
414.36	Evaluasi
414.4	Pelombaan Desa /evaluasi pembangunan desa
414.41	Pedoman
414.42	Penilaian
414.43	Kejuaraan
414.44	Piagam
415	Koordinasi
415.1	Sektor Khusus(K)
415.2	Rapat Koordinasi Horisontal(RKH)
415.3	Team Koordinasi Pusat (TKP)

415.4	Kerjasama
415.41	Luar Negeri(UNICEF)
415.42	Perguruan Tinggi
415.43	Departemen/Lembaga Non Departemen
416	-
417	-
418	-
419	-
<b>420</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
420.1	Pendidikan khusus.Klasifikasi di sini:Pendidikan Putra-2 Irian Jaya
421	Sekolah /Perguruan Tinggi
421.1	Pra Sekolah /play group
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Tinggi
421.5	Sekolah Kejuruan
421.6	Kegiatan Sekolah,Dies Natalis,Lustrum
421.61	Perguruan tinggi (PT)
421.7	Kegiatan Pelajar
421.71	Reuni Darmawisata
421.72	Pelajar Teladan
421.73	Resimen Mahasiswa(MENWA)
421.74	Kunjungan Ilmiah
421.75	Class meeting
421.76	Ekstra kurikuler
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9	Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan Masuk Sekolah,testing,Ujian,Pendaftaran,mapram,perpeloncoan.
422.2	Tahun Pelajaran / Tahun Akademik
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah-Klasifikasikan disini SPP
422.5	Beasiswa
422.6	SPMA,BOP
422.7	Biaya belajar mandiri (BBM)
422.8	Masa orientasi siswa
422.9	Orientasi kampus /OPSPEK
423	Metode Belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah,Simposium
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan,Widyawisata,KKN
423.5	Kurikulum
423.6	Karya Tulis
423.7	Ujian
423.8	PKL
423.9	Praktek Industri
423.10	Kurikulum berbasis kompetensi (KBK)
423.11	Sylabusi

423.12	Tes Hasil Belajar (THB)
424	Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor
	Klasifikasikan disini: Guru Teladan
424.1	Pengawas sekolah
424.2	Tenaga Administrasi
425	Sarana Pendidikan
425.1	Gedung
425.11	Gedung Sekolah
425.12	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan Mahasiswa
425.13.2	Buku
425.13.3	Perlengkapan Sekolah
426	Keolahragaan
426.1	Cabang Olahraga
426.2	Sarana
426.21	Gedung olah raga
426.22	Stadion
426.23	Lapangan
426.24	Kolam Renang
	Pesta olah-raga klasifikasi disini::PON, Porsade, Olimpiade, dan sebagainya
426.24.4	KONI
427	Kepramukaan Meliputi organisasi dan Kegiatan Remaja. Klasifikasikan disini: Gelanggang Remaja
428	Kepramukaan
429	Pendidikan kedinasan Untuk Departement Dalam Negri lihat 890
430	KEBUDAYAAN
430.1	Wiyosan Dalem
431	Kesenian
431.1	Cabang Kesenian
431.2	Sarana
431.21	Gedung Kesenian
432	Kepeurbakalaan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan Kuno
432.21	Candi, termasuk pemugaran
432.22	Benda
432.23	Keraton
432.24	Pura
432.25	Situs
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan
436	Kepercayaan
437	-
438	-
439	-
<b>440</b>	<b>KESEHATAN</b>
441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gizi

441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
441.6	Perawat
441.7	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
441.8	Kesehatan Ibu dan Anak
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Penyimpanan
442.3	Obat Generic
442.4	Pemalsuan
442.5	Obat terlarang (NAPZA)
443	Penyakit Menular
443.1	Pencegahan
443.2	Pembrantasan & Pencegahan Penyakit Menular langsung (P.2 M .L.)
443.21	Kusta
443.22	Kelamin
443.23	Frambosia
443.24	T.B.C
443.25	SARS
443.26	HIV/AIDS
443.3	Epidemiologi & Karantina (Epidka)
443.31	Kholera
443.32	Imunisasi
443.33	Surveilense
443.34	Rabies (Anjing Gila)
443.4	Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular sumber menular (P.2 B.)
443.41	Malaria
443.42	Dengue Haemorrhagic Fever (Demam Berdarah DHF)
443.43	Filaria
443.44	Serangga
443.5	Hygiene Sanitasi
443.51	Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan & Minuman. (TPP MM)
443.52	Sarana air Minum & Jamban Keluarga (Samijaga)
443.53	Pestisida
444	Gizi
444.1	Kekurangan makanan Bahaya kelaparan ,Busung lapar
444.2	Keracunan makanan
444.3	Menu makanan rakyat
444.4	Bahaya kelaparan
444.5	Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
444.6	Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi
445	Rumah sakit Balai kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS
445.1	Rumah Sakit Jiwa
445.2	Rumah Sakit Mata
445.3	Balai Kesehatan Ibu dan Anak
445.4	Rumah Bersalin
445.5	POSYANDU (Balita dan Lansia )



445.6	Rumah sakit/Balai Kesehatan lainnya
446	Tenaga medis
447	Alat Medis
448	Pengobatan tradisional
448.1	Pijat
448.2	Tusuk Jarum
448.3	Jamu Tradisional
448.4	Dukun
449	-
450	AGAMA
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	Sholat
451.12	Zakat,Fitrah, termasuk BAZIS
451.13	Puasa Termasuk kegiatan bulan ramadhan
451.14	Haji.Jangan diklasifikasikan disini lihat:456
451.15	MTQ
451.2	Rumah Ibadat (Masjid,Mushola, Surau, Langgar )
451.3	Tokoh Agama (Kyai,Dai, Kaum Rois)
451.4	Pendidikan
451.41	Tinggi
451.42	Menengah
451.43	Dasar
451.44	Pondok Pesantren
451.45	Gedung sekolah
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	Buku
451.48	Dakwah
451.49	Organisasi/lembaga pendidikan
451.50	Dasar termasuk SDIT
451.51	Play Group
451.5	Harta Agama
	Wakaf,Baitamal dsb.
451.6	Peradilan
451.7	Organisasi Keagamaan bukan politik
	Majelis Ulama (MUI)
451.8	Mazhab
452	Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Kebaktian Rumah Ibadat
452.3	Tokoh Agama
	Rokhaniawan,Pendeta,Domine.
452.4	Mazhab
452.5	Organisasi gerejani
453	Katholik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadat
453.3	Misa
453.4	Tokoh Agama
453.5	Rokhaniawan,Pastur, frater

453.6	Mazhab
453.7	Organisasi gerejani
453.8	Kapel
453.9	Ortodok
453.10	Roma
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadat
454.3	Tokoh Agama
	Rokhaniawan
454.4	Mazhab
454.5	Organisasi Keagamaan
454.6	Pura
454.7	Bedanda
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadat
455.3	Tokoh Agama,Rokhaniawan
455.4	Mazhab
455.5	Organisai Keagamaan
455.6	Vihara
455.7	WALUBI
456	Urusan Haji
456.1	ONH (Ongkos Naik Haji)
456.2	Manasik
457	-
458	-
459	-
460	SOSIAL
461	Rehabilitasi penderita cacad
461.1	Cacad mata
461.2	Cacad tubuh
461.3	Cacad mental
461.4	Bisu/tuli
462	Tuna sosial
462.1	Gelandangan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna susila
462.4	Anak nakal (pengguna/pecandu Narkoba, Tunawisma )
463	Kesejahteraan anak/keluarga
463.1	Anak putus sekolah
463.2	Ibu teladan
463.3	DBKS
463.4	Gerakan Masyarakat dampak kenaikan harga BBM
463.5	TDL
463.6	Tarif telpon
463.7	Pengentasan kemiskinan
463.8	AKP (Analisa Kemiskinan Partisipatif )
464	Pembinaan Pahlawan

464.1	Pahlawan meliputi:penghargaan kepada pahlawan,tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
	Perintis Kemerdekaan meliputi:pembinaan,penghargaan dan
464.2	Dan Tnjangan Kepada Printis
464.3	Cacad veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut Usia
465.2	Korban kekacauan,pengungsi,repatriasi, KUBE, USEP
466	Sumbangan Sosial
466.1	Korban bencana
466.2	Pencarian dana untuk sumbangan meliputi:Penyelenggaraan undian,ketangkasan,bazar dan sebagainya
466.3	Panti asuhan
467	Bimbingan Sosial
467.1	Masyarakat suku terasing Meliputi:bimbingan pendidikan,kesehatan,pemukiman,operasi busana dan sebagainya
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus keluarga,Raja
469.4	Krematolum
469.5	Organisasi/ Perkumpulan :Yayasan bunga Selasih, PUKJ
470	KEPENDUDUKAN
471	Kewarganegaraan Indonesia
471.1	W.N.I asli
471.2	W.N.I Keturunan asing
471.21	Permohonan kewarganegaraan
471.22	Permohonan ganti nama
471.3	Asimilasi
472	Kewarganegaraan asing
473	Tidak berkewarganegaraan(state less)
474	Pendaftaran penduduk, termasuk Permohonan Akta
474.1	Kelahiran
474.11	Adopsi
474.2	Perkawinan/perceraian/rujuk
474.3	Kematian
474.4	Kartu penduduk
475	Perpindahan Penduduk
475.1	Transmigrasi
475.2	Urbanisasi
476	Keluarga Berencana
476.1	Alat kontrasepsi
476.2	KB Lestari
476.3	Penyuluhan lapangan KB(PLKB)
476.4	Pos KB Desa
476.5	Akseptor KB
476.6	Sub PPKBD
477	Cacatan Sipil

478	-
479	-
480	MEDIA MASA
481	Penerbitan
481.1	Surat kabar
481.2	Majalah
481.3	Buku
481.4	Penterjemahan
481.5	Tabloid
482	Radio
482.1	RRI
482.(11)	Siaran pedesaan,jangan klasifikasikan disini lihat:441.54
482.2	Non RRI
482.3	Luar Negeri
482.4	PRRSSNI
482.5	Radio swasta Niaga
483	Televisi
483.1	TPRI
483.2	TV Swasta
483.3	Acara Televisi
484	Film
484.1	Dokumenter
484.2	Perjuangan/ EPOS
484.3	Anak
484.4	Remaja
484.5	Dewasa
485	Pers.
485.1	Kewartawanan/ Reporter/ presenter
485.11	Wawancara
486	Grafika
487	Penerangan
487.1	Pameran Non Komersil
488	Operation Room
489	Hubungan Masyarakat
489.1	Baliho
489.2	Bill Board
490	-
491	-
492	-
493	-
494	-
495	-
496	-
497	-
498	-
499	-
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan Stabilisasi
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang

503	Perizinan pada umumnya.Untuk perizinan sesuatu bidang,klasifikasikan pada masalahnya.
504	-
505	-
506	-
507	-
508	-
509	-
510	PERDAGANGAN
	Klasifikasikan disini:Tataniaga
510.1	Promosi perdagangan
510.11	Pekan Raya
510.12	Iklan
510.13	Pameran/ pameran Non komersial Lh.487.1
510.14	Tataniaga
510.15	EXPO
510.16	Promosi Inventaris
510.2	Pelelangan
510.3	Tera
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok.Tambahan kode wilayah Beras,garam,minyak
511.2	Pasar
511.3	Pertokoan,kaki lima,kios, super market/Swalayan, Mall
512	Ekspor
513	Impor
514	Perdagangan antar pulau, Dokumen Pembayaran (SKBDN/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)
515	Perdagangan Luar Negeri, Dokumen Pembayaran (L/C/Letter OF Credit),Dokumen Pengangkutan
516	Pergudangan Termasuk Tangki penyimpanan minyak goreng, Peti kemas/ Container
517	Aneka Usaha perdagangan
518	Koperasi( untuk BUUD,KUD lihat:412.31412.32)
519	-
520	PERHATIAN
521	Tanaman pangan
521.1	Program
521.11	Bimas/Inmas, termasuk Kredit UsahaTani (KUD), Penyuluhan
521.2	Produksi
521.21	Padi
521.22	Palawija, Sawah, Gogo, Huma
521.23	Horticultura.
521,231	Sayuran
521,232	Buah-buahan
521,233	Tanaman Hias
521,234	Perlebahan
521.24	Panen gagal(puso)
521.3	Sarana Usaha pertanian
521.31	Peralatan meliputi:Traktor dan sebagainya
521.32	Pembibitan

521.33	Pupuk
521.4	Perlindungan tanaman
521.41	Penyakit
521,411	Penyakit Daun
521,412	Penyakit Batang
521.42	Hama
521,421	WERENG
521,422	Walang Sangit
521,423	Tungro
521,424	Tikus
521,425	Pemberantasan
521.43	Pestisida
521.5	Tanah pertanian pangan
521.51	Persawahan
521.52	Perladangan
521.53	Kebun
521.54	Tanah kritis
521.6	Pengusaha,Petani
521.61	Bina Usaha
521.62	Pasca Panen
522	Kehutanan
522.1	Program
522.11	Hak pengusahaan hutan
522.12	Tata guna hutan
522.13	Perpetaan hutan
522.14	Tumpang sari
522.15	Jatinasasi
522.2	Produksi
522.21	Kayu
522.22	Non Kayu
522.3	Sarana Usaha kehutanan
522.4	Penghijauan, Reboisasi
522.5	Kelestarian
522.51	Cagar alam,marga satwa,suaka marga satwa.
522.52	Berburu.Meliputi larangan dan ijin berburu
522.53	Kebun Binatang
523	Perikanan
523.1	Program
523.11	Penyuluhan
523.12	Teknologi
523.2	Produksi
523.21	Pelelangan
523.3	Usaha perikanan
	Pembibitan, peminjahan ikan, pembenihan ikan, budi daya ikan,
523.32	Daerah penangkapan
523.4	Sarana
523.41	Peralatan
523,411	Kapal
523,412	Jaring
523,413	Pelabuhan/Dermaga

523,414	Tempat pelelangan Ikan (TPI)
523.42	Pelabuhan
523.5	Pengusaha,nelayan
523.51	Kapal/ Motor Boat
523.52	Jaring
523.53	Cold Storage
523.54	Tempat es
523.6	Hama penyakit termasuk pemberantasnya
523.7	Data perikanan
523.8	Nelayan
523.81	Perkampungan Nelayan
523.82	Pelanggaran Kapal
523.9	Pelestarian ikan
524	Peternakan
524.1	Produksi
524.11	Susu ternak rakyat
524.12	Telur
524.13	Daging
524.14	Kulit
524.2	Sarana usaha peternakan
524.21	Pembibitan
524.22	Lahan kebun bibit
524.23	Kandang
524.3	Kesehatan Hewan
524.31	Penyakit Hewan
524.32	Pos Kesehatan Hewan (POSKESWAN)
524.33	Tesi Pullorum
524.34	Karantina
524.4	Perunggasan
524.41	Ayam ras
524.42	Ayam Buras
524.5	Pengembangan Ternak
524.51	Inseminasi Buatan
524.52	Pembibitan/Bibit Unggul
524.53	Penyebaran ternak
524.6	Makanan Ternak
524.7	Tempat Pematangan Hewan, Rumah potong Ayam (RPA)
524.8	Data Pertenakan
525	Perkebunan
525.1	Program
525.2	Produksi
525.21	Karet
525.22	The
525.23	Tembakau
525.24	Tebu
525.25	Cengkeh
525.26	Kelapa/Kopra/Kelapa sawit
525.27	Kopi
525.28	-
525.29	Aneka tanaman

525.30	Pembibitan
525.31	Hama/ Penyakit (Gulma,Badra, Termasuk Pemberantasannya
525.32	Pengolahan Tanah
526	-
527	-
528	-
529	-
530	PERINDUSTRIAN
530.08	Undang-undang gangguan
531	Industi logam
532	Industri mesin/elektronik
533	Industri kimia/farmasi
534	Industri tekstil
535	Industri makanan/minuman
536	Aneka industri/perusahaan
536.1	Home Industri
537	Aneka kerajinan
537.1	Kerajinan Rakyat
537.2	Handy Craft
538	Usaha Negara/ BUMN
538.1	Perjan
538.2	Perum
538.3	Persero
538.4	PT
539	Perusahaan Daerah
540	PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN
541	Minyak bumi/bensin (Bahan Galian)
541.1	Pengusahaan
541.11	Eksplorasi
541.12	Kontrak kerja
541.13	Eksplorasi
541.14	Pemurnian
541.2	Pengolahan
541.3	Penyaluran
541.31	Tangki,pompa,tanker
541.4	Bahan Galian Strategis
541.41	Bitumen cair ,lilin bumi, gas alam
541.42	Aspal
541.43	Bitumen padat
541.44	Batu bara
541.45	Uranium, Radium, Thorium, Nikel, Kobalt
541.5	Bahan Galian Vital
541.51	Besi
541.52	mangaan
541.53	Molibden
541.54	Khrom
541.55	Wolfram
541.56	Vanadium
541.57	titan,seng, Timah, tembaga,Emas, platina
541.58	Perak, air raksa, intan, Arsin, antimony



541.59	Yodium, belerang, korundum, klor, kriolot
541.6	Bahan Galian yang tidak termasuk galian Strategis atau Vital
541.61	Nitrat-nitrat, phosphate-posphat, garam batu
541.62	Asbes, talk, mika, grafit, magndesit
541.63	Yarosit, kusit, towas (alum), oker
541.64	Batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, felosfor, zinn, bentonit
541.65	Batu apung, tras, opsidian, perlit, tanah diatom, tanah serap
541.66	Marmmer, batu tulis, batu kapur, dolomite, kalsit
541.67	Ganit, andesit, basal, tarakhit, tanah liat, pasir
542	Gas bumi
543	Logam mulya
543.1	Intan,emas,perak
544	Logam
544.1	Timah
544.2	Aluminium,boxit
544.3	Besi.Termasuk besi tua
544.4	Tembaga
545	Aneka tambang/bahan galian
546	Geologi
546.1	Vulkanologi
546.11	Pengawasan gunung berapi
546.2	Sumur artetis
547	Hidrologi
548	Kesamudraan
549	-
450	PERHUDUNGAN
551	Perhubungan darat
551.1	Lalu lintas jalan raya,sungai,danau
551.11	Keamanan lalu lintas rambu-rambu
551.2	Angkutan jalan raya
551.21	Perizinan
551.22	Terminal
551.23	Alat angkutan
551.24	Alat uji
551.3	Angkutan sungai
551.31	Perizinan
551.32	Terminal
551.33	Pelabuhan
551.4	Angkutan danau
551.41	Perizinan
551.42	Terminal
551.43	Pelabuhan
551.5	Feri
551.51	Perizinan
551.52	Terminal
551.53	Pelabuhan
551.6	Perkereta-apian
551.61	Pintu lintasan
551.62	Signal
551.63	Stasiun

552	Perhubungan laut
552.1	Lalu lintas angkutan laut
522.11	Keamanan lalu lintas,rambu-rambu
552.12	Pelayaran dalam Negeri
552,121	Mercusuar
552.13	Pelayaran luar negeri
552.2	Perkapalan.Alat angkutan
552.3	Pelabuhan/dermaga
552.4	Pengerukan
552.5	Penjagaan pantai
553	Perhubungan Udara
553.1	Lalulintas Udara
553.2	Pelabuhan Udara/Bandara/Air port
553.3	Alat angkutan
554	Pos
555	Telekomunikasi
555.1	Telepon, wartel
555.2	Telegrap
555.3	Telex/SSB
555.4	Satelit
555.5	Stasiun bumi
555.6	Internet/Warnet
555.7	Faximale
555.8	Satelit, Stasiun bumi
556	Pariwisata dan rekreasi
556.1	Obyek kepariwisataan
556.11	Taman Mini Indonesia Indah
556.2	Perhotelan
556.3	Travel service
556.4	Tempat rekreasi
556.5	Promosi Kepariwisataaan
556.51	Mandala wisata
556.52	Tourism Information Centre
556.6	Perjalanan wisata
556.61	Tour and Travel Agent
556.62	Biro Perjalanan
556.7	Pramuwisata
556.71	Pramuwisata Madya
556.72	Pramuwisata Muda
556.73	Pramuwisata Khusus
556.8	Fasilitas Wisatawan
	Hotel/Montel
	Pondok Wisatawan
	Penginapan/Losmen
	Asosiasi Profesi Kepariwisataaan (PHRI, PUTRI, ASITA, HPI, HPP)
557	Meteorologi
557.1	Curah Hujan
557.2	Hujan Batuan
557.3	Peneropongan Bintang
558	-

559	-
560	TENAGA KERJA
560.1	Pengangguran
561	Upah
562	Penempatan tenaga kerja
563	Latihan Kerja
564	Tenaga sukarela
564.1	Butsi
564.2	Padat karya
565	Perselisihan perburuhan
566	Keselamatan kerja
566.1	ASTEK
566.2	JAMSOSTEK
567	Pemutusan hubungan kerja
568	Kesejahteraan buruh
569	Tenaga kerja orang asing
570	PERMODALAN
571	Modal domestik
572	Modal asing
573	Modal patungan (joint venture)/ penyertaan modal
574	Pasar uang dan modal, Bursa efek
575	Saham
576	-
577	-
578	-
579	-
580	PERBANKAN/ MONETER
581	Kredit
582	Inventasi/IIRIF
583	Deposito, Tabungan
584	Bank Pembangunan Daerah
584.1	Lembaga Perbankan
584.11	Bank Sentral
584,111	Bank Indonesia
584.12	Bank Umum
584,121	Bank Pemerintah
584,122	Bank Swasta
584,123	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
584.13	Bank Syariah
584,131	BMT ( Baitul Mal wal Tamwil)
585	Asuransi
	Dana kecelakaan lalu lintas (Uang Pertanggung Jawaban)
586	Alat pembayaran. Chek, giro, wesel,trasfer
587	Fiscal
588	Hutang negara, obligasi
589	Moneter/Transaksi/ Moneter lainnya
590	AGRARIA
591	Tata guna tanah
591.1	Pemetaan dan pengukuran
591.2	Perpetaan

591.3	Penyediaan data, peta dan publikasi
591.4	Fatwa tataguna tanah
591.5	Tanah kritis
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran pemilikan dan pengurusan tanah pertanian
592.12	Penentuan tanah obyek landreform
592.13	Pembagian tanah obyek landreform
592.14	Sengketa redistribusi tanah obyek landreform
592.2	Ganti rugi
592.21	Ganti rugi tanah kelebihan
592,211	Sengketa ganti rugi tanah kelebihan
592.22	Ganti rugi tanah absentee
592,221	Sengketa ganti rugi tanah absentee
592.23	Ganti rugi tanah pertikelir
592,231	Sengketa ganti rugi tanah pertikelir
592.3	Bagi hasil
592.31	Penetapan imbalan bagi hasil
592.32	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil
592.33	Sengketa perjanjian bagi hasil
592.4	Gadai tanah
592.41	Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah
592.42	Pelaksanaan gadai tanah
592.43	Sengketa gadai tanah
592.5	Bimbingan dan penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan dan landreform ( Y.D.L )
	Tambahkan kode wilayah
593	Pengurusan hak-hak tanah
593.01	Penyusunan program dan bimbingan tehnik
593.1	Sewa tanah
593.11	Sewa tanah untuk tanaman tertentu: tebu ,tembakau, rosela, corhourus
593.2	Hak milik
593.21	Perorangan
593.22	Badan Hukum
593.3	Hak pakai
593.31	Perorangan
593,311	Warga negara Indonesia
593,312	Warga negara asing
593.32	Badan Hukum
593,321	Badan hukum Indinesia
593,322	Badan hukum asing. Keduta, Konsulat Kantor dagang asing
593.33	Tanah gedung-gedung negeri
593.4	Guna Usaha
593.41	Perkebunan besar
593.42	Perkebuna rakyat
593.43	perternakan
593.44	Perikanan
593.45	Kehutanan
593.5	Hak guna bangunan

593.51	Perorangan
593.52	Badan hukum
593.53	P3MB ( Panitia pelaksanaan penguasaan milik Belanda)
593.54	Badan hukum asing Belanda- PRK No. 5/65
593.55	Pemulihan hak ( PenPres 4/1060)
593.6	Hak pengelolaan
593.61	PN. Perumnas. Bonded ware house. Industrial estate. Real estate
593.62	Perusahaan Daerah pembangunan perumahan
593.63	HPH (Hak Pengolaha Hutan)
593.64	HPHH (Hak Pengolan Hasil Hutan)
593.7	Sengketa tanah
593.71	Peradilan perkara tanah (lihat juga 183)
593.8	Pencabutan dan pembebasan tanah
593.81	Pencabutan hak
593.82	Pembebasan tanah
593.83	Ganti rugi tanah
594	Pendaftaran tanah
594.1	Pengukuran/pemetaan
594.11	Fotogrametri
594.12	Terristris
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana pengukuran ( Permen agraria No. 6/1965)
594.3	Sertifikat
594.4	Pejabat pembuat akte tanah (PPAT)/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)
595	Transmigrasi
595.1	Tata guna tanah
595.2	Landreform
595.3	Pengurusan hak-hak tanah
595.4	Pendaftaran tanah
596	-
597	-
598	-
599	-
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	tata bangun, kontruksi, industri kontruksi
602	Kontraktor pembohong
602.1	Tender
603	arsitektur
604	Bahan bangunan
604.1	Tanah dan batu seperti:
	Batu belah, Steen slaag, split dan sebagainya
	pasir, koral, lempung,kapur, marmer
604.2	Aspal
	Aspal buatan,aspal alam (butas)
604.3	Besi dan logam lainnya
604.31	Besi beton
604.32	Besi profil (Konstruksi)
604.33	Paku

604.34	aluminium profil
604.4	Bahan-bahan pelindung dan pengawet(Cat,tech oil,pengawet kayu)
604.5	Semen
604.6	Kayu Seperti: balok, papan, dolken, plywood, gabus dsb.
604.7	Bahan Penutup Atap ( Genteng, asbes gelombang)
604.8	Alat-alat penggantung dan pengunci
604.9	Bahan-bahan bangunan lainnya
605	Instalansi
605.1	Instalansi Bangunan
605.2	Instalansi Listrik
605.3	Instalansi air/sanitasi
605.4	Instalansi pengaturan udara
605.5	Instalansi akustik
605.6	Instalansi cahaya/penerangan
606	Konstruksi pencegahan
606.1	konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
606.2	Terhadap Gempa
606.3	Terhadap Angin/udara/panas
606.4	Terhadap Kegaduhan
606.5	Terhadap gas/explosive
606.6	Terhadap serangga
606.7	Terhadap Radiasi atom
607	-
608	-
609	-
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
611.1	Bangunan Waduk
611.11	Bendungan
611.12	Tanggul
611.13	Pelimpah banjir
611.14	Menara pengambilan
611.2	Bangunan Pengambilan
611.21	Bendungan
611.22	Bendungan dengan pintu bilas
611.23	Bendungan dengan pompa
611.24	Pengambilan bebas
611.25	Pengambilan bebas dengan pompa
611.26	Sumur dengan pompa
611.27	Kantung lumpur
611.28	Silt ekstraktor
611.29	Eslope chanel
611.3	Bangunan pembawa
611.31	Saluran
611,311	Saluran Induk
611,312	Saluran sekunder
611,313	Suplesi
611,314	Tersier
611,315	Saluran kwarter
611,316	Saluran pasangan

611,317	Saluran tertutup/Terowongan
611.32	Bangunan
611,321	Bangunan bagi
611,322	Bangunan bagi dan sadap
611,323	Bangunan sadap
611,324	Bangunan check
611,325	Bangunan terjun
611.33	Box Tersier
611.34	Got miring
611.35	Talang
611.36	Syphon
611.37	Gorong-gorong
611.38	Pelimpah samping
611.4	Bangunan Pembuang
611.41	Saluran
611,411	Saluran pembuang induk
611,412	Saluran pembuang sekunder
611,413	Saluran pembuang tersier
611.42	Bangunan
611,421	Bangunan out let
611,422	Bangunan terjun
611,423	Bangunan penambah banjir
611.43	Gorong-gorong pembuang
611.44	Talang pembuang
611.45	Syphon pembuang
611.5	Bangunan lainnya
611.51	Jalan
611,511	Jalan Inspeksi
611,512	Jalan logistic
611.52	Jembatan
611,521	Jembatan Inspeksi
611,522	Jembatan Hewan
611.53	Tangga Cuci
611.54	Kubangan Kerbau
611.55	Waduk Lapangan
611.56	Bangunan Penunjang
611.57	Jaringan telepon
611.58	Stasiun Argo
612	Poider
612.1	Tanggul Keliling
612.11	Tanggul
612.12	Bangunan Penutup Sungai
612.13	Jembatan
612.2	Bangunan pembawa
612.21	Saluran
612,211	Saluran muka
612,212	Saluran pembawa induk
612,213	Saluran pembawa sekunder
612.22	Stasiun pompa pemasukan
612.23	Bangunan bagi

612.24	Gorong-gorong
612.25	Syphon
612.3	Bangunan pembuangan
612.31	Stasiun pompa pembuang
612.32	Saluran
612,321	Saluran pembuangan induk
612,322	Saluran pembuangan sekunder
612.33	Pintu air pembuangan
612.34	Gorong-gorong pembuangan
612.35	Syphon pembuangan
612.4	Bangunan lainnya
612.41	Bangunan
612,411	Bangunan Pengukur air
612,412	Bangunan pengukur curah hujan
612,413	Bangunan gudang stasiun pompa
612,414	Bangunan listrik pompa
612.42	Rumah petugas eksploitasi
613	Pasang Surut
613.1	Bangunan pembawa
613.11	Saluran
613,111	Saluran pembawa induk
613,112	Saluran pembawa sekunder
613,113	Saluran pembawa tersier
613,114	Saluran penyimpanan air
613.12	Bangunan pintu pemasukan
613.2	Bangunan pembuang
613.21	Saluran
613,211	Saluran pembuang induk
613,212	Saluran pembuang sekunder
613,213	Saluran pembuang tersier
613,214	Saluran pengumpul air
613.22	Bangunan pintu pembuangan
613.3	Bangunan lainnya
613.31	Kolam pasang
613.32	Saluran
613,321	Saluran lalulintas
613,322	Saluran muka
613.33	Bangunan
613,331	Bangunan penangkis kotoran
613,332	Bangunan pengukur muka air
613,333	Bangunan pengukur curah hujan
613.34	Jalan
613.35	Jembatan
614	Pengendalian sungai
614.1	Bangunan pengaman
614.11	Tanggul banjir
614.12	Pintu pengatur banjir
614.13	Klep pengatur banjir
614.14	Tembok pengaman talud
614.15	Krib



614.16	Kantung lumpur
614.17	Check dam
614.18	Syphon
614.2	Saluran pengaman
614.21	Saluran banjir
614.22	Saluran drainage
614.23	Corepure
614.3	Bangunan lainya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614,321	Stasiun pengukur curah hujan
614,322	Stasiun pengukur air
614,323	Stasiun pengukur cuaca
614,324	Stasiun pos penjagaan
615	Pengaman pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan lainya
616	Air tanah
616.1	Stasiun pompa
616.2	Bangunan pembawa
616.3	Bangunan pembuang
616.4	Bangunan lainya
617	-
618	-
619	-
620	JALAN
621	Jalan Kota
621.1	Daerah penguasaan
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	Bangunan sementara
621.21	Jalan sementara
621.22	Jembatan sementara
621.23	Kantor proyek
621.24	Gudang proyek
621.25	Barak kerja
621.26	Laboratorium lapangan
621.27	Rumah
621.3	Badan jalan
621.31	Pekerjaan tanah (earth work)
621.32	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.41	Lapisan pondasi bawah
621.42	Lapisan pondasi
621.43	Lapisan permukaan
621.5	Drainage
621.51	Parit sawah
621.52	Gorong-gorong (culvert)

621.6	Buku Trotir
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	Median
621.71	Tanah
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah Samping
621.81	Tanaman
621.82	Pagar
621.9	Bangunan pelengkap dan pengaman
621.91	Rambu-rambu/ tanda tanda lalu lintas
621.92	Lampu penerangan
621.93	Lampu pengatur lalulintas
621.94	Patok-patok KM
621.95	Patok-patok R.O.W.(Sempadan)
621.96	Rel pengaman
621.97	Pagar
621.98	Turap penahan
621.99	Bronjong
622	JALAN LUAR KOTA
622.1	Daerah penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.2	Bangunan sementara
622.21	Jalan sementara
622.22	Jembatan sementara
622.23	Kantor proyek
622.24	Gudang proyek
622.25	Barak kerja
622.26	Laboratorium lapangan
622.27	Rumah
622.3	Badan jalan
622.31	Pekerjaan tanah (earth work)
622.32	Stabilitas
622.4	Perkerasan(pavement)
622.41	Lapis pondasi bawah
622.42	Lapis pondasi
622.43	Lapis permukaan
622.5	Drainage
622.51	Parit
622.52	Gorong-gorong(culvert)
622.53	Sub drainage
622.6	Trottoir
622.61	Tanah
622.62	Perkerasan
622.71	Median

622.72	Tanah
622.73	Tanaman
622.74	Perkerasan
622.75	Pasangan
622.8	Daerah samping
622.81	Tanaman
622.82	Pagar
622.9	Bangunan pelengkap dan pengaman
622.91	Rambu-rambu/ tanda tanda lalu lintas
622.92	Lampu penerangan
622.93	Lampu lalu lintas
622.94	Patok-patok KM
622.95	Patok-patok R.O.W.(Sempadan)
622.96	Rel-rel pengaman
622.97	Pagar
622.98	Turap pengaman
622.99	Bronjong
623	-
624	-
625	-
626	-
627	-
628	-
629	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada jalan kota
631.1	Daerah penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunan sementara
631.21	Jalan sementara
631.22	Jembatan sementara
631.23	Kantor proyek
631.24	Gudang proyek
631.25	Barak kerja
631.26	Laboratorium lapangan
631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan tanah (earth work)
631.31	Galian tanah
631.32	Timbunan tanah
631.4	Pondasi
631.41	Pondasi kepala jembatan
631.42	Pondasi pijar
631.43	Pondasi angker
631.5	Bangunan bawah
631.51	Kepala jembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan

631.6	Bangunan
631.61	Gelagar
631.62	Lantai
631.63	Perkerasan
631.64	Jalan orang/Trotoir
631.65	Sandaran
631.66	Talang air
631.7	Bangunan pengaman
631.71	Turap/penahan
631.72	Bronjong
631.73	Strek dam
631.74	Kist dam
631.75	Coupure
631.76	Krib
631.8	Bangunan pelengkap
631.81	Rambu-rambu/Tanda-tanda lalu lintas
631.82	Lampu penerangan
631.83	Lampu pengatur lalu lintas
631.84	Patok pengaman
631.85	Patok R.O.W.(Sempedan)
631.86	Pagar
631.9	Parit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	Drainage
631.94	Baku
631.95	Median
632	Jembatan pada jalan luar kota
632.1	Daerah penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan
632.2	Bangunan sementara
632.21	Jalan sementara
632.22	Jembatan sementara
632.23	Kantor proyek
632.24	Gudang proyek
632.25	Barak kerja
632.26	Laboratorium lapangan
632.27	Rumah
623.3	Pekerjaan tanah
623.31	Galian tanah
623.32	Timbunan tanah
623.4	Pondasi
623.41	Pondasi kepala jembatan
623.42	Pondasi pijar
623.43	Pondasi angker
623.5	Bangunan bawah
623.51	Kepala jembatan
623.52	Pilar

623.53	Piloon
623.54	Landasan
623.6	Bangunan atas
623.61	Gelagar
623.62	Lantai
623.63	Perkerasan
623.64	Jalan orang/Trotoir
623.65	Sandaran
623.66	Talang air
623.7	Bangunan pengaman
623.71	Turap/penahan
623.72	Bronjong
623.73	Strek dam
623.74	Kist dam
623.75	Coupure
623.76	Krib
623.8	Bangunan pelengkap
623.81	Rambu-rambu/Tanda-tanda lalulintas
623.82	Lampu penerangan
623.83	Lampu pengatur lalulintas
623.84	Patok pengaman
623.85	Patok R.O.W.(Sempedan)
623.86	Pagar
623.9	Sprit
623.91	Badan
623.92	Perkerasan
623.93	Drainage
623.94	Baku
623.95	Median
633	-
634	-
635	-
636	-
637	-
638	-
639	-
640	BANGUNAN
641	Bangunan pemerintah
641.1	Gedung pengadilan
641.2	Rumah pejabat negara
641.3	Gedung DPR
641.4	Gedung balai kota
641.5	Penjara/Rumah Tahanan
641.6	Perkantoran
642	Bangunan pendidikan
642.1	Taman kanak-kanak
642.2	SD & Sekolah menengah
642.3	Perguruan tinggi
643	Bangunan Rekreasi
643.1	Bangunan Olahraga

643.2	Gedung Kesenian
643.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	Bank
644.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
645.2	Gedung Parkir
645.3	Rumah Sakit
645.4	Gedung Telkom
645.5	Terminal Angkutan Udara
645.6	Terminal Angkutan Air
645.7	Terminal Angkutan Darat
645.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi
646.3	Kraton
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
648.1	Rumah Perkotaan
648.11	Inti/ Sederhana
648.12	Sedang/ Mewah
648.2	Rumah Pedesaan
648.21	Rumah Contoh
648.3	Real Estate
649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Diatas Tiang
649.2	Dinding
649.21	Penahan Beban
649.22	Tidak Menahan Beban
649.3	Atap
649.31	Atap genting
649.32	Atap asbes
649.33	Atap seng
649.4	Lantai/ Langit - langit
649.41	Suspended
649.42	Solit
649.5	Pintu/ Jendela
649.51	Pintu Harmonik
649.52	Pintu Biasa
649.53	Pintu Sorong
649.54	Jendela Kayu
649.55	Jendela Sorong
649.56	Jendela Vertikal
650	TATA KOTA

650.1	UWSSP
650.2	USDRP
650.3	Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
650.4	Master Plan
650.5	BKM (Bantul Kota Mandiri)
651	Daerah Perdagangan / Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkotaan
652	Daerah pemeritahan
653	Daerah perumahan (site & service)
653.1	Kepadatan rendah (low density)
653.2	Kepadatan tinggi (high density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri berat
654.2	Industri ringan
654.3	Industri rumah (home industri)
655	Daerah rekreasi (open space )
655.1	Public gardens
655.2	Sport & playing fields
655.3	Open space
656	Tranportasi (tata letak )
656.1	Jaringan jalan
656.11	Penerangan jalan
656.2	Jaringan kereta api
656.3	Jaringan sungai
657	Assaineering
657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instalansi Pengolahan
657.21	Bangunan
657,211	Bangunan penyaring
657,212	Bangunan penghancur kotoran/Sampah
657,213	Banguanan pengendap
657,214	Bangunan pengering lumpur
657.22	Unit disinfektan
657.23	Unit perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	Bangunan pengumpul
658.12	Bangunan Pemusnahan
658.13	Teknologi Daur Ulang/Bioculture
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran air
658.31	Air buangan Industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan kota
659	-
660	TATA LINGKUNGAN
660.1	Lingkungan
660.2	Kebersihan lingkungan
660.3	Pencemaran

660.31	Pencemaran air
660.32	Pencemaran udara
661	Daerah hutan
662	Daerah pertanian/Perkebunan
663	Daerah pemukiman
664	Pusat pertumbuhan
665	Transportasi
665.1	Jaringan jalan
665.2	Jaringan kereta api
665.3	Jaringan sungai
666	-
667	-
668	-
669	-
670	KETERANGAN
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.11	Kelistrikan PLN
671.12	Kelistrikan non PLN
671.2	Pembangkitan tenaga listrik
671.21	PLTA- Pembangkit listrik tenaga air
671.22	PLTD- Pembangkit listrik tenaga diesel
671.23	PLTG- Pembangkit listrik tenaga gas
671.24	PLTM-Pembangkit listrik tenaga matahari
671.25	PLTN-Pembangkit listrik tenaga nuklir
671.26	PLTB-Pembangkit listrik tenaga panas bumi
671.27	PLTU-Pembangkit listrik tenaga uap
671.3	Transmisi tenaga listrik
671.31	Gardu Induk/Gardu penghubung/Gardu trafo
671.32	Saluran udara tegangan tinggi
671.33	Kabel bawah tanah
671.4	Distribusi tenaga listrik
671.41	Gardu distribusi
671.42	Tegangan menengah
671.43	Tegangan rendah
671.44	Jaringan bawah tanah
671.5	Pengusahaan listrik
671.51	Sambungan listrik
671.52	Penjualan tenaga listrik
671.53	Tarif listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga minyak
674	Tenaga gas
675	Tenaga matahari
676	Tenaga nuklir
677	Tenaga panas bumi
678	Tenaga uap
679	Tenaga lainnya
680	PERALATAN
681	-



682	-
683	-
684	-
685	-
686	-
687	-
688	-
689	-
690	AIR MINUM
691	Intake
691.1	Broncaptering
691.2	Sumur
691.21	Sumur Pompa
691.22	Sumur Artesis
691.3	Bendungan
691.4	Saringan(Screen)
691.5	Pintu air
691.6	Saluran pembawa
691.7	Alat ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi air baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup udara(air relatif)
692.3	Katup pelepasan(blow off)
692.4	Bak pelepasan tenaga
692.5	Jembatan pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi pengelolaan
693.1	Bangunan ukur
693.2	Bangunan aerasi
693.3	Bangunan pengendapan
693.4	Bangunan pembubuh bahan kimia
693.5	Bangunan pengaduk
693.6	Bangunan saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear hell
694	Distribusi
694.1	Reversior menara bawah tanah
694.11	Menara
694.12	Reversior dibawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan Pipa

694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.61	Hydran umum
694.62	Hydran kebakaran
694.7	Katup
694.71	Katup udara(air relatif)
694.72	Katup pelepasan(blow off)
694.8	Bak pelepasan tenaga (pressure reducing valve)
695	-
696	-
697	-
698	-
699	-
700	PENGAWASAN
701	Bidang urusan dalam
702	Bidang peralatan
703	-
704	-
705	-
706	Bidang Organisasi / Ketatajaksanaan
707	-
708	-
709	-
710	BIDANG PEMERINTAHAN
	Tambahan perincian 100 pada 710
711	-
712	-
713	-
714	-
715	-
716	-
717	-
718	-
719	-
720	BIDANG POLITIK
	Tambahan perincian 200 pada 720
721	-
722	-
723	-
724	-
725	-

726	-
727	-
728	-
729	-
730	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
	Tambahan perincian 300 pada 730
731	-
732	-
733	-
734	-
735	-
736	-
737	-
738	-
739	-
740	BIDANG KESRA (Kesejahteraan Rakyat)
	Tambahan perincian 400 pada 740
741	-
742	-
743	-
744	-
745	-
746	-
747	-
748	-
749	-
750	BIDANG PEREKONOMIAN
	Tambahan perincian 500 pada 750
751	-
752	-
753	-
754	-
755	-
756	-
757	-
758	-
759	-
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
	Tambahan perincian 600 pada 760
761	-
762	-
763	-

764	-
765	-
766	-
767	-
768	-
769	-
770	-
771	-
772	-
773	-
774	-
775	-
776	-
777	-
778	-
779	-
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
	Tambahan perincian 800 pada 780
781	-
782	-
783	-
784	-
785	-
786	-
787	-
788	-
789	-
790	BIDANG KEUANGAN
	Tambahan perincian 900 pada 790
791	-
792	-
793	-
794	-
795	-
796	-
797	-
798	-
799	-
<b>800</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>
	Klarifikasi disini: Kebijakanaksanaan kepegawaian
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.3	Pendatan Ulang PNS
800,045	Pengaduan
800.05	Team
800.07	Statistik
800.08	Peraturan perundang - undangan
810	PENGADAAN
	Meliputi lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai
811	Lamaran

811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Panggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan calon pegawai
813.1	Pengangkatan calon pegawai I
813.2	Pengangkatan calon pegawai II
813.3	Pengangkatan calon pegawai III
813.4	Pengangkatan calon pegawai IV
813.5	Pengangkatan calon guru INPRES
814	Pengangkatan tenaga lepas
814.1	Pengangkatan tenaga bulanan
814.2	Pengangkatan tenaga harian
814.3	Pengangkatan tenaga pensiuran
815	Pengangkatan tenaga asing
816	-
817	-
818	-
819	-
820	MUTASI
	Meliputi pengangkatan , kenaikan gaji berkala ,kenaikan pangkat ,
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan menjadi pegawai negeri (tetap)
821.11	Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan I
821.12	Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan II
821.13	Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan III
821.14	Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan IV
821.2	Pengangkatan dalam jabatan, Pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan.
821.21	Sekjen/Dirijen/Irjen/Kaban
821.22	Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda
821.23	Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu
821.24	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pemeriksa
821.25	Residen/Pembantu Gubernur
821.26	Wadana/Pembantu Bupati
821.27	Camat
821.28	Lurah administratif (lurah Desa lihat 141)
821.29	Jabatan lainnya
822.	Kenaikan gaji berkala
822.1	Pegawai golongan I
822.2	Pegawai golongan II
822.3	Pegawai golongan III
822.4	Pegawai golongan IV
823	Kenaikan perangkat/ pengangkatan
823.1	Pegawai golongan I
823.2	Pegawai golongan II
823.3	Pegawai golongan III
823.4	Pegawai golongan IV
824	Pemindahan/pelimpahan/perbantuan

824.1	Pegawai golongan I
824.2	Pegawai golongan II
824.3	Pegawai golongan III
824.4	Pegawai golongan IV
824.5	Lolos butuh
825	Deta sering dan penempatan kembali
826	Penunjukkan tugas belajar
826.1	Dalam negri
826.2	Luar negri
826.3	Tunjangan belajar
826.4	Penempatan kembali
827	Wajib militer
828	Mutasi pegawai instansi lain
829	-
830	KEDUDUDKAN
	Meliputi penghitungan masa kerja, penyesuaian pangkat/gaji,
831	Penhitungan masa kerja
832	Penyesuaian pangkat/gaji
832.1	Pegawai golongan I
832.2	Pegawai golongan II
832.3	Pegawai golongan III
832.4	Pegawai golongan IV
833	Penghargaan ijazah
834	Jenjang pangkat
835	-
836	-
837	-
838	-
839	-
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
	Meliputi tunjangan, dana, perawatan kesehatan, koperasi/distribusi,
841	Tunjangan
841.1	Jabatan lainnya
841.2	Kehormatan
841.3	Kematian
841.4	Tunjangan hari raya
841.5	Perjalanan dinas tetap/cuti/pindah
841.6	Keluarga
841.7	Pangan, uang makan
842	Dana
842.1	Taspen
842.2	Kesehatan
842.3	Asuransi
843	Perawatan Kesehatan
843.1	Poliklinik
843.2	Perawatan dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga berencana
844	Koperasi/Distribusi
844.1	Distribusi pangan

844.2	Distribusi sandang
844.3	Distribusi lainnya
845	Perumahan/Tanah
845.1	Perumahan pegawai
845.2	Tanah kapling
845.3	Losmen/hotel
846	Bantuan sosial
846.1	Bantuan Kebakaran
846.2	Bantuan banjir
846.3	Bencana Gempa
847	Rekreasi, wisata eksekutif
848	Dispensasi
849	-
850	CUTI
	Meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti hamil, cuti naik
851	Cuti tahunan
852	Cuti besar
853	Cuti sakit
854	Cuti hamil
855	Cuti naik haji
856	Cuti di luar tanggungan negara
857	Cuti alasan lain
858	Cuti bersama
859	-
860	PENILAIAN
	Meliputi penghargaan, hukuman, konduite, ujian dinas, penilaian
861	Penghargaan ijazah
861.1	Bintang/Satyalencana
861.2	Kenaikan pangkat anumerta
861.3	Kenaikan gaji istimewa
861.4	Hadiah berupa uang
861.5	Pegawai teladan
862	Hukuman
862.1	Tegoran/peringatan
862.2	Penundaan kenaikan gaji
862.3	Penurunan pangkat
862.4	Pemindahan
	Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak
863	Konduite
864	Ujian dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
864.3	Tingkat III
	Penilaian kehidupan pegawai negeri. Meliputi : Petunjuk pelaksanaan
866	Rehabilitasi
867	Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dan Penilaian Angka Kredit (PAK)
868	-
869	-
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN

	Meliputi formasi, bezetting, registrasi, daftar
871	Formasi
872	Bezetting
873	Registrasi
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legittimasi/tanda pengenal
873.4	Daftar keluarga
873.5	Laporan Perkawinan
873.6	KARIS
873.7	KARSU
874	Daftar riwayat pekerjaan
874.1	Tanggal lahir
874.2	Penggantian nama
874.3	Kepartaian/organisasi
875	Kewenangan mutasi kepegawaiaan
875.1	Pelimpahan wewenang
875.2	Specimen tanda tangan
876	Pengajian
876.1	SKPP
877	Sumpah/janji
878	Koprs kepegawain
879	-
880	PEMBERHENTIAN
	Meliputi pemberhentian-pemberhentian atas permintaan
881	Permintaan sendiri
882	Dengan hak pensiun
882.1	Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan I
882.2	Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan II
882.3	Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan III
882.4	Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan IV
882.5	Pensiun janja/duda
882.6	Pensiun yati m piatu
882.7	Uang muka pensiun
883	Karena meninggal
883.1	Karena meninggal dalam tugas
884	Alasan lain
885	Uang pesangon
886	Uang tunggu
887	Untuk sementara waktu
888	Tidak dengan hormat
889	-
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
	Meliputi perencanaan, pendidikan reguler, pendidikan non
891	Perencanaan
891.1	Ijin Belajar
892	Pendidikan reguler
892.1	IIP
892.2	Agraria
892.21	Pemerintahan Dalam Negeri



892.22	Kursus-kursus/penataran
892.3	Pendidikan keluar negeri
892.4	Akademi
893	Pendidikan non reguler
893.1	SESPA
893.2	SELAPUTDA
893.3	Kursus-kursus/penataran
893.4	Sepada/ADUM
893.5	Sepala/ADUMLA
894	Pendidikan keluar negeri
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah,sisposium
895.3	Diskusi
895.4	Kuliah lapangan,widya wisata,KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya tulis
896	Tenaga pengajar
896.1	Widyaswara
897	Administrasi pendidikan
897.1	Tahun pelajaran
897.2	Persyaratan,meliputi pendaftaran,testing,ujian
898	Fasilitas
898.1	Tunjangan belajar
898.2	Asrama
898.3	Uang makan
898.4	Uang transpot
898.5	Uang buku
899	Sarana
899.1	Buku
899.2	Gedung lihat 011;peralatan lihat 020
900	KEUANGAN
901	Nota keuangan
902	APBN
903	APBD
904	-
905	-
906	-
907	-
908	-
909	-
910	ANGGARAN
911	Rutin/Anggaran Satuan Kerja (ASK)
912	Pembangunan
913	Anggaran belanja tambahan/Perubahan APBD
914	DIK
914.1	Dafatar Usulan Kegiatan (DUK)
914.2	Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)/ DASK
914.3	Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA)/ RASK
915	DIP

915.1	Daftar Usulan Proyek (DUP)
915.2	Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA)
915.3	Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA)
916	Dana Alokasi Umum
917	Dana Alokasi Khusus
918	Dana-dana lainnya
919	-
920	OTORISASI
921	Rutin
922	Pembangunan
923	SIAP
923.1	SIAPDA
924	Ralat SKO
925	-
926	-
927	-
928	-
929	-
930	VERIFIKASI
931	SPM rutin (Daftar P8)
932	SPM pembangunan (Daftar P8)
933	Penerimaan (Daftar P6-P7)
934	SPJ rutin
935	SPJ pembangunan
936	Nota pemeriksaan
937	SP pemindahan pembukuan (SPPP)
938	-
939	-
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan perhitungan anggaran
942	Permintaan data anggaran
943	Laporan fisik pembangunan
944	-
945	-
946	-
947	-
948	-
949	-
950	-
951	PERBENDAHARAAN
952	Tuntutan ganti rugi (ICW Pasal 74)
953	Tuntutan perbendaharaan
954	Penghapusan kekayaan negara
955	Pengangkatan/Penggantian bendaharawan
956	Specimen tanda tangan
957	Surat tagihan piutang, ikhtiar bulanan
958	-
959	-
960	-
961	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

962	Pemeriksaan kas dan hasil penerimaan kas
963	Pemeriksaan administrasi bendaharawan
964	Laporan keuangan bendaharawan
965	-
966	-
967	-
968	-
969	-
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan keuangan
972	Subsidi
973	Pajak, Ipeda, I.H.H., I.H.P.H.
974	Retisbusi
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan Presiden, Menteri
979	-
980	-
981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-
990	BENDAHARAWAN
991	SKPP
992	Tegoran SPJ
993	-
994	-
995	-
996	-

997	-
998	-
999	-

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**YULHAIDIR**